

Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran pada BKAD Kota Medan

Tasya Rahmadani¹, Ruswan Nurmadi¹, Muhammad Arief^{1,*}

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Harapan Medan, Medan, Indonesia

Email: ¹rahmadanitasya29@gmail.com, ²rnurmadi@gmail.com, ^{3,*}muhammadarief@gmail.com

Abstrak–Tujuan penelitian ini untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan dengan menganalisis kinerja anggaran pendapatan untuk tahun anggaran 2018-2023. Objek yang akan diteliti berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pendapatan Kota Medan. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yang dilakukan dengan cara membuat deskripsi permasalahan yang telah diidentifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis varians pendapatan memiliki selisih negatif artinya kinerja keuangan yang kurang baik karena realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, pertumbuhan pendapatan mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan derajat desentralisasi dinilai baik, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kurang efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi kemampuan keuangan Kota Medan masih belum ideal dengan selisih pendapatan yang negatif, pertumbuhan yang fluktuatif serta kurang efektif. Untuk itu Pemerintah Kota Medan diharapkan mampu meningkatkan serta memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah, dengan menggali lebih dalam potensi yang dimiliki daerah.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah; Laporan Realisasi Anggaran; Kinerja Pendapatan Daerah; Kinerja Pendapatan Anggaran

1. PENDAHULUAN

Kinerja keuangan pemerintah daerah didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil kerja di bidang keuangan pemerintah daerah, yang mencakup jumlah yang diterima dan dibelanjakan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan oleh kebijakan atau peraturan perundang-undangan selama periode anggaran tertentu. Meskipun demikian, bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang berasal dari perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan bagian dari Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Kemala et al. 2023). Analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan merupakan salah satu cara untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah. Akuntabilitas pemerintah daerah dapat diukur dengan rasio keuangan seperti rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisien, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan (Pahlamawan et al. 2022).

Tingkat pencapaian hasil kerja di bidang keuangan pemerintah daerah disebut kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil kerja ini mencakup uang yang diterima dan dibelanjakan oleh pemerintah daerah menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan oleh kebijakan atau peraturan perundang-undangan selama periode anggaran tertentu (Rahmawati 2023). Meskipun demikian, bentuk kinerja tersebut berasal dari rasio keuangan yang berasal dari perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan bagian dari Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Salah satu cara untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Rasio keuangan seperti rasio kemandirian, efektivitas, efisien, aktivitas, dan pertumbuhan dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah (Rawis et al 2020).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada dasarnya merupakan laporan anggaran Lembaga Keuangan Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban laporan keuangan daerah kepada pemerintah pusat yang meliputi analisis pendapatan dan analisis pembiayaan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dan dengan realisasi periode sebelumnya (Wahdania and Sa'diah 2022).

Pada tahun 2018 realisasi anggaran pendapatan Kota Medan sebesar 81% dengan total realisasi Rp 4.253.618.758.532,53. Di tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 88% dengan total nilai realisasi sebesar Rp 5.518.772.179.306,31. Di tahun berikutnya tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 84% dengan total realisasi sebesar Rp 3.988.761.485.152,01. Pada 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 96% dengan total nilai realisasi sebesar Rp 5.023.080.346.608,29. Kemudian di tahun 2022 kembali mengalami penurunan persentase menjadi 86%. Terakhir pada tahun 2023 mengalami kenaikan kembali dengan realisasi sebesar Rp. 5.802.580.478.749,50 (Medan 2025). Dengan cenderung mengalami fluktuatif pendapatan daerah selama kurun waktu 6 tahun belum maksimal dalam mencapai angka yang sudah dianggarkan. Kemudian pertumbuhan pendapatan tahun 2020 mengalami penurunan artinya pertumbuhan yang negatif menunjukkan penurunan kinerja dalam hal ini kinerja pendapatan Pemerintah Kota Medan. Untuk itu Pemerintah Kota Medan sangat diperlukan evaluasi agar bisa memaksimalkan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga dapat dilihat sumber-sumber pendapatan daerah yang perlu ditingkatkan atau dimaksimalkan agar Pemerintah Kota Medan tidak ketergantungan dana dari pusat.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Kota Medan jika dianalisis dengan menggunakan varians pendapatan belanja, pertumbuhan pendapatan, derajat desentralisasi, dan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.2 Anggaran Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, APBD didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah. Dalam APBD, satu pihak menunjukkan perkiraan pengeluaran untuk membiayai kegiatan atau proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan pihak lain menunjukkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah untuk menutupi pengeluaran tersebut (Labi 2019).

2.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Amanda, Jouzar, and Ishak 2021).

2.4 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Akuntansi Keuangan Daerah merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang memerlukan (Mutiar, Dethan, and Tamen 2022). Sistem akuntansi pemerintah daerah ialah suatu rangkaian prosedur, dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi seperti komputer (Hanifa 2021).

2.5 Pengelola Keuangan Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Anggi, Utami, and Widhiyanti 2021).

2.6 Analisis Kinerja Pendapatan Daerah

Analisis Varian Pendapatan adalah analisis varian anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan (Agung 2022). Menurut Ambya (2023) analisis varian pendapatan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Varian Pendapatan} = \text{Realisasi Pendapatan} - \text{Anggaran} \quad (1)$$

Pertumbuhan Pendapatan Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif (Sari and Baku 2022). Menurut Ambya (2023) analisis pertumbuhan pendapatan dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan Thn } t - \text{Pendapatan Thn } t-1}{\text{Pendapatan Thn } t-1} \quad (2)$$

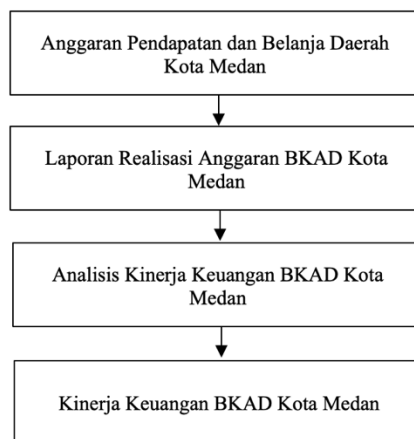
Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah (Soedarsa 2020). Menurut Ambya (2023) analisis derajat desentralisasi dirumuskan berdasarkan persamaan berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \quad (3)$$

Rasio efektivitas dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD yang dianggarkan. Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan (Tani, Amaliah, and Usman 2023). Berikut rumus perhitungan rasio efektivitas.

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\% \quad (4)$$

Berdasarkan penjelasan di atas dalam penelitian ini model penelitian digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Kerangka Dalam penelitian dan penulisan ilmiah, kerangka berpikir adalah landasan teoritis atau pemikiran yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kerangka berpikir adalah model konseptual yang menunjukkan bagaimana konsep, teori, dan variabel yang berkaitan dengan masalah tersebut berhubungan satu sama lain (Sugiyono 2017).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Perhitungan Varian Pendapatan Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2018-2023

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Varian/Selisih (Rp)	(%)
2018	5.239.408.011.116	4.253.618.758.532	(985.789.252.583)	81%
2019	6.257.239.035.331	5.518.772.179.306	(738.466.856.024)	88%
2020	4.757.852.448.866	3.988.761.485.152	(769.090.963.714)	84%
2021	5.208.964.175.119	5.023.080.346.608	(185.883.828.510)	96%
2022	6.522.123.770.774	5.617.379.246.746	(904.744.524.028)	86%
2023	7.296.157.352.009	5.802.580.478.749	(1.493.576.873.260)	80%
Rata – Rata			(846.258.716.354)	86%

Tabel di atas menunjukkan bahwa varian pendapatan daerah Kota Medan secara keseluruhan memiliki rata – rata 86% atau sebesar Rp. -846.258.716.354 yang mempunyai selisih negatif, artinya kinerja pendapatan daerah belum cukup baik dalam memaksimalkan pendapatan daerah.

Tabel 2. Perhitungan Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2018-2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pertumbuhan	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Pertumbuhan
2018	1.636.204.514.683		4.253.618.758.532	
2019	1.829.669.955.348	11,8%	5.518.772.179.306	29,7%
2020	1.509.831.081.747	-17,4%	3.988.761.485.152	-27,7%
2021	1.906.512.189.047	26,2%	5.023.080.346.608	25,9%
2022	2.186.261.231.905	14,6%	5.617.379.246.746	11,8%
2023	2.442.782.732.668	11,7%	5.802.580.478.749	3,2%

Pertumbuhan PAD pada tahun 2019 sebesar 11,8% menurun pada tahun 2020 sebesar -17,4%. Pada tahun 2021 pertumbuhan PAD naik sebesar 26,2%, menurun pada tahun 2022 sebesar 14,6% dan turun lagi pada tahun 2023 sebesar 11,7%. Pertumbuhan TPD pada tahun 2019 sebesar 29,7% turun pada tahun 2020 sebesar -27,7%, pada tahun 2021 naik dengan nilai sebesar 25,9% namun kembali turun pada tahun 2022 sebesar 11,8% dan turun lagi sebesar 3,2% pada tahun 2023.

Tabel 3. Perhitungan Derajat Desentralisasi Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2018-2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio	Kinerja
2018	1.636.204.514.683	4.253.618.758.532	38,4%	Baik
2019	1.829.669.955.348	5.518.772.179.306	33,1%	Baik
2020	1.509.831.081.747	3.988.761.485.152	37,8%	Baik
2021	1.906.512.189.047	5.023.080.346.608	37,9%	Baik
2022	2.186.261.231.905	5.617.379.246.746	38,9%	Baik

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio	Kinerja
2023	2.442.782.732.668	5.802.580.478.749	42%	Baik
Rata-Rata			38%	Baik

Rasio yang dihasilkan adalah kurang dari 50% dengan kategori baik, maka dapat diartikan bahwa pemerintah daerah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan baik. Derajat desentralisasi daerah Kota Medan memiliki rata-rata sebesar 38% yang artinya kemampuan daerah Kota Medan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan selama periode 2018 – 2023 terbilang baik.

Tabel 4. Perhitungan Tingkat Efektivitas PAD Kota Medan Tahun Anggaran 2018-2023

Tahun	Anggaran PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio	Kinerja
2018	2.112.663.059.116	1.636.204.514.683	77,4%	Kurang Efektif
2019	2.312.760.384.058	1.829.669.955.348	79,1%	Kurang Efektif
2020	1.813.909.461.511	1.509.831.081.747	83,2%	Kurang Efektif
2021	2.139.239.943.474	1.906.512.189.047	89,1%	Kurang Efektif
2022	3.050.594.560.414	2.186.261.231.905	71,6%	Tidak Efektif
2023	7.296.157.352.009	5.802.580.478.749	65,1%	Tidak Efektif
Rata-Rata			77,6%	Kurang Efektif

Rasio efektivitas PAD dengan rata-rata sebesar 77,6% yang menandakan bahwa kemampuan daerah Kota Medan dalam menjalankan tugas dikategorikan kurang efektif. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam memobilisasi penerimaan PAD belum sesuai dengan yang telah dianggarkan.

3.1 Pembahasan

Berdasarkan hasil perhitungan varians pendapatan menunjukkan bahwa rata – rata selisih sebesar Rp. 846.258.716.354 atau 86% dengan selisih yang negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah Kota Medan belum cukup baik. Selain itu, dilihat dari tahun 2018 hingga 2023 realisasi pendapatan belum dapat dicapai oleh pemerintah Kota Medan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pendapatan Kota Medan belum mampu memenuhi target pendapatan dikarenakan terdapat pertumbuhan yang negatif. Dalam penyusunan pendapatan daerah, digunakan pos-pos yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.

Berdasarkan hasil perhitungan pertumbuhan pendapatan dapat dilihat pertumbuhan pendapatan Kota Medan tahun anggaran 2018 – 2023 mengalami pertumbuhan fluktuatif. Selain itu meskipun dari segi persentase tingkat pertumbuhan TPD mengalami fluktuatif, Pemerintah Kota Medan dalam hal ini dapat dikatakan memiliki kinerja positif, karena peningkatan yang tinggi pada tahun anggaran 2022 dan 2023 dengan kata lain mampu kembali bertumbuh secara positif walaupun angka pertumbuhannya belum maksimal karena tahun 2019 memiliki pertumbuhan yang sangat tinggi yaitu 29.7%.

Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan derajat desentralisasi daerah Kota Medan tahun anggaran 2018 – 2023 rata – rata derajat desentralisasi yang diperoleh sebesar 38%. Meskipun mengalami naik dan turun, namun secara keseluruhan derajat desentralisasi daerah Kota Medan dikatakan baik. Artinya kemampuan Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan, kegiatan pemerintahan, dan sebagainya terbilang baik.

Kemudian pada hasil perhitungan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan diketahui memiliki nilai rata-rata yang diperoleh dari rasio efektivitas PAD sebesar 77,6% kurang dari 100% yang berarti kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan kurang efektif. Hal ini menggambarkan kemampuan daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD belum sesuai dengan yang telah dianggarkan. Pemerintah Kota Medan telah menunjukkan kinerja yang kurang baik dalam mencapai PAD yang telah direncanakan. Untuk meningkatkan PAD, pemerintah daerah harus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatan yang telah ada. Ini akan memungkinkan pemerintah daerah untuk terus membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan tanpa menghambat kemajuan sektor usaha. Selain itu, pemerintah daerah harus mampu mendorong pertumbuhan ekowisata.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar and Harahap (2022) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi kemampuan keuangan Kota Medan masih belum ideal. Dilihat dari hasil rata-rata pada rasio pertumbuhan posisi Kota Medan berada pada kondisi belum ideal. Hal ini berarti pemerintah Kota Medan harus menggali lebih dalam lagi potensi yang dimiliki daerah, sehingga dapat meningkatkan PAD yang berperan besar dalam APBD.

4. KESIMPULAN

Kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan berdasarkan hasil analisis varian pendapatan daerah tahun anggaran 2018-2023 Kota Medan secara keseluruhan memiliki rata-rata 86% namun mempunyai selisih negatif. Hal ini menunjukkan

bahwa kinerja pendapatan Kota Medan belum mampu memenuhi target pendapatan dengan baik. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan berdasarkan hasil analisis pertumbuhan pendapatan dapat dilihat pertumbuhan pendapatan di Kota Medan untuk tahun anggaran 2018 – 2023 mengalami fluktuatif. Meskipun begitu pertumbuhan pendapatan pada tahun 2022 dan 2023 meningkat dengan signifikan. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan berdasarkan hasil analisis rasio derajat desentralisasi Meski mengalami naik turun, namun secara keseluruhan derajat desentralisasi daerah Kota Medan memiliki rata-rata sebesar 38% yang artinya kemampuan daerah Kota Medan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan terbilang baik. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan berdasarkan hasil analisis efektivitas PAD kemampuan daerah Kota Medan dalam menjalankan tugas dikategorikan kurang efektif. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam memobilisasi penerimaan PAD belum sesuai dengan yang telah dianggarkan.

REFERENCES

- Agung. 2022. "Analisis Rasio Keuangan APBD Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kota Medan Tahun 2016-2020." *Akuntansi Prima* 4(1).
- Amanda, K. A. Jouzar, and F. Ishak. 2021. "Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Bandung." *Indonesia Accounting Research Journal* 2(1).
- Ambya. 2023. *Ekonomi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Revisi. Bandar Lampung: CV Anugerah Utama Raharja.
- Anggi, I., P. Utami, and N. L. Widhiyani. 2021. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah." *Jurnal Universitas Udayana* 31(8).
- Hanifa, L. 2021. "Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016-2020." *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 7(4).
- Kemala, P., D. Lubis, L. Handayani, N. F. Hidayah, and P. Kemaal. 2023. "Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan." *SINTAMA* 3(1).
- Labi, A. 2019. "Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 - 2015." *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi* 5(1).
- Medan, Pemerintah Kota. 2025. "Laporan Realisasi Anggaran Kota Medan." *Portal Medan*. Retrieved (<https://portal.medan.go.id/>).
- Mutiara, Y. C., M. A. Dethan, and N. Tamenno. 2022. "Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang." *Jurnal Ilmiah* 2 1(7).
- Pahlamawan, U., T. Tambusa, A. S. Prasaja, and E. Anita. 2022. "Analisis Pengukuran Tingkat Kinerja Keuangan APBD Provinsi Jambi Menggunakan Rasio Keuangan Daerah Periode Tahun 2017-2020." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4.
- Rahmawati, R. 2023. "Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Berau." *JESYA* 6(1).
- Rawis, S. D., H. Manossoh, and R. J. Pusung. 2020. "Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Tahun 2016-2018)." *Jurnal EMBA* 8(4).
- Sari, P., and A. Baku. 2022. "Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato." *Jurnal Mirai Management* 7(2).
- Siregar, C. M., and L. H. Harahap. 2022. "Analisis APBD Untuk Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan Tahun 2015-2021." *MEKA* 3(2).
- Soedarsa, H. G. 2020. "Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010-2014." *Jurnal Akuntansi & Keuangan* 11(1).
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Tani, S. L., T. H. Amaliah, and Usman. 2023. "Analisis APBD Dan Kewajiban Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19." *Journal of Managenet of Business* 6(2).
- Wahdania, A., and K. Sa'diah. 2022. "Efektivitas Dan Kesesuaian Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan PSAP NO.02 Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Bogor." *Mabiska Jurnal* 7(1).